

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai perancangan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada CV Multi Sarana Palembang berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021 sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dibuat oleh CV Multi Sarana Palembang sebelumnya, diketahui bahwa perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap masih menggunakan UU PPh Pasal 17 Tahun 2008. CV Multi Sarana Palembang belum menerapkan perhitungan berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021 yang berlaku mulai dari tahun pajak 2022. Oleh karena itu, penulis melakukan perancangan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan UU HPP Tahun 2021. Penulis juga melakukan perancangan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai lepas satuan, pegawai lepas upah borongan dan pegawai honorer. Berdasarkan perhitungan yang telah dibuat, diketahui bahwa setiap karyawan tetap pada CV Multi Sarana Palembang mendapatkan gaji pokok bulanan, tunjangan lembur, tunjangan transportasi dan premi asuransi kesehatan sedangkan semua pegawai lepas tidak dikenakan PPh Pasal 21 dikarenakan penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi Rp300.000. Penulis juga membuat perhitungan atas jasa produksi pegawai tetap tahun 2022 yang dihitung dengan menggunakan *Microsoft excel*.
2. Penulis membuat dan menyusun rekapitulasi penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 dipotong/ disetor digunakan untuk mengisi formulir 1721-II yang belum dilakukan oleh CV Multi Sarana Palembang. Formulir 1721-II digunakan untuk melaporkan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja kepada karyawan. Penulis membuat perhitungan yang telah dirancang untuk mempermudah dalam pengisian Formulir 1721-II dihitung dengan menggunakan *Microsoft excel*.

3. Berdasarkan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan tidak ada pengaruh selisih dan berbeda dalam perhitungan. Hanya saja perbedaan UU HPP terdiri dari 5 lapisan dimana sebelumnya pada UU PPh hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke-5 dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas 5 Milyar Rupiah. Kedua, pada lapisan pertama pemerintah memperbesar Penghasilan Kena Pajak dalam setahun dari Rp0 - Rp50.000.000 menjadi dari Rp0 - Rp60.000.000. Akibat dari perubahan kedua, apabila sebelum UU HPP seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60 Juta setahun dikenakan 2 lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%. Maka setelah UU HPP ini seorang karyawan dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp60.000.000 setahun hanya akan dikenakan 1 lapis Tarif pajak yakni 5%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis membuat saran-saran perbaikan yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan yaitu:

1. Berdasarkan hasil perancangan perhitungan yang telah dibuat, penulis berharap CV Multi Sarana Palembang dapat menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021.
2. Penulis juga berharap CV Multi Sarana Palembang untuk membuat rekap tahunan. Pembuatan rekap tahunan berguna untuk mempermudah pengisian formulir 1721-II dan melaporkan PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja kepada karyawan atau penerima penghasilan lainnya.
3. CV Multi Sarana Palembang diharuskan menerapkan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap berdasarkan UU HPP Tahun 2021 yang secara resmi berlaku mulai dari tahun pajak 2022.